

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan pada tinjauan kepustakaan yang didukung oleh sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder, maka kesimpulan yang dapat ditarik adalah sebagai berikut:

Perlindungan hukum bagi petani yang mengalami kerugian akibat ketidaksesuaian isi pupuk dan label pupuk adalah dengan cara penyelesaian sengketa, baik melalui jalur non litigasi maupun jalur litigasi. Apabila petani memutuskan untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur non litigasi maka cara yang dapat diupayakan adalah musyawarah mufakat yang dilakukan bersama-sama dengan produsen pupuk. Sedangkan, apabila petani memutuskan untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur litigasi maka petani dapat menggugat produsen pupuk dengan dasar gugatan bahwa produsen telah melakukan wanprestasi. Dalam hal ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 1267 KUHP, petani dapat memilih untuk memaksa produsen memenuhi perjanjian disertai dengan ganti rugi atau tidak; atau menuntut pembatalan persetujuan dengan ganti rugi atau tidak; atau memaksa produsen untuk membayar ganti rugi saja.

2. Saran

Dalam rangka menghindari dilakukannya perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam perjanjian dan demi terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak baik produsen maupun petani, alangkah lebih baiknya jika transaksi jual-beli pupuk antara produsen dan petani dilakukan dengan menggunakan perjanjian tertulis agar nantinya dalam hal terjadinya sengketa, pembuktian lebih mudah untuk dilakukan, sehingga perlindungan petani menjadi lebih terjamin.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Ahmadi Miru, Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Akmaluddin Syahputra, Hukum Perdata Indonesia Jilid, Citapustaka Media Perintis, Bandung, 2012.
- Bachtiar, Metode Penelitian Hukum, UNPAM PRESS, Tangerang Selatan, 2018.
- Djaja S. Meliala, Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan, Penerbit Nuansa Aulia, Bandung, Cetakan Pertama, 2015.
- J. Satrio, Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir Dari Perjanjian, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- Johannes Gunawan, Penggunaan Perjanjian Standard dan Implikasinya Pada Asas Kebebasan Berkontrak, PT. Alumni, Bandung, 1987.
- J.R. Raco, Metode Penelitian Kualitatif, PT. Gramedia Widiasarana, Jakarta, 2010.
- Joko Sriwidodo dan Kristiawanto, Memahami Hukum Perikatan, Penerbit Kepel Press, Yogyakarta, 2021.
- Lukman S. Az., Aspek Hukum Perjanjian: Kajian Komprehensif Teori dan Perkembangannya, Penebar Media Pustaka, Yogyakarta, Cetakan 1, 2019.
- Mariam D. Badruzaman, Aneka Hukum Bisnis, PT. Alumni, Bandung, 1994.
- Munir Fuady, Konsep Hukum Perdata, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- P. Susilo, Prinsip-prinsip Praktis Perlindungan Distributor, Jakarta, 2002.
- Pinus Lingga dan Marsono, Petunjuk Penggunaan Pupuk, Penebar Swadaya, Jakarta Timur, Cetakan 1, 2013.
- R. Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, PT. Binacipta, Bandung, 1986.
- R. Subekti, Hukum Perjanjian, PT. Intermasa, Bandung, 2010.

- R. M. Suryodiningrat, Perikatan-Perikatan Bersumber Perjanjian, Tarsito, Bandung, 1982.
- Riduan Syahrani, Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata, PT. Alumni, Bandung, 2004.
- Salim H. S., Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Sinar Grafika, Jakarta, 2003.
- Somawijaya (ed), Kajian Penafsiran Hakim Tentang Perbedaan Antara Perkara Wanprestasi dan Penipuan, Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, 2012.
- Tioner Purba, et.al., Pupuk dan Teknologi Pemupukan, Yayasan Kita Menulis, Medan, 2021.
- Wirjono Prodjodikoro, Azaz-azaz Hukum Perjanjian, PT. Mandar Maju, Bandung, 2011.
- Yahya A. Zein, Kontrak Elektronik dan Penyelesaian Sengketa E-Commerce, CV. Mandar Maju, Bandung, 2009.
- Zakiah, Hukum Perjanjian: Teori dan Perkembangannya

JURNAL

- Afriadi Simanjuntak, et.al., Respon Pertumbuhan dan Produksi Bawang Merah (*Allium ascalonicum*) terhadap Pemberian Pupuk NPK dan Kompos Kulit Buah Kopi, Jurnal Online Agroekoteknologi Vol. 1 No. 3, 2013, hlm. 362-173.
- Ari W. Hertanto, Aspek-Aspek Hukum Perjanjian Distributor dan Keagenan (Suatu Analisis Keperdataan), Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-37 No. 3, 2007, hlm. 383.
- Gusti T. Ihsan, et.al., Upaya Petani Meningkatkan Produksi Padi di Desa Tabihi Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Jurnal Pendidikan Geografi Vol. 3 No. 2, 2016, hlm. 13-14.
- Harjono, et.al., Akibat Hukum Konsignatie Bagi Para Pihak Dalam Perkara Perdata, Jurnal VERSTEK Vol. 3 No. 1, 2015, hlm. 2-3.

- Ida S. Roidah, Manfaat Penggunaan Pupuk Organik Untuk Kesuburan Tanah, Jurnal Universitas Tulungagung Bonorowo Vol. 1 No. 1, 2013, hlm. 32.
- R.M. Panggabean, Keabsahan Perjanjian dengan Klausul Baku, Jurnal Hukum Vol. 17 No. 4, 2010, hlm. 654.
- Retnowulan Sopiani, Bentuk Perlindungan Hukum dan Implikasi Yuridis Putusan Pengadilan yang Mengabulkan Gugatan Debitur Baru dalam Perjanjian ALih Debitur Tanpa Persetujuan Kreditur, Jurnal Ilmiah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Universitas Brawijaya Fakultas Hukum Malang, 2013, hlm. 3.
- Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum dan Pendidikan Hukum, Jurnal Hukum dan Pembangunan Vol. 6 No. 6, 1976, hlm. 430.
- Wiwik Hartatik, et.al., Peranan Pupuk Organik dalam Peningkatan Produktivitas Tanah dan Tanaman, Jurnal Sumberdaya Lahan Vol. 9 No. 2, Desember 2015, hlm. 108.
- Yati Nurhayati, Konstitusionalitas Perjanjian Distribusi dalam Persaingan Usaha Sehat, Jurnal Konstitusi Vol. 8 No. 6, 2011, hlm. 1020.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian

Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 26/M-IND/PER/4/2013 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Pupuk Anorganik Tunggal Secara Wajib

Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 08/M-IND/PER/2/2014 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Pupuk Anorganik Majemuk Secara Wajib

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 36/PERMENTAN/SR/10/2017 tentang Pendaftaran Pupuk Anorganik

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenh Tanah

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2020 dan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2020

MAJALAH

Endang Sukana dan Tejoyuwono Notohadiprawiro, Peranan Pupuk Dalam Pembangunan Pertanian, Ilmu Tanah Universitas Gadjah Mada, Repo, 2006.

Felix O. Soebagjo, Beberapa Aspek Hukum Dari Perjanjian Keagenan dan Distributor, Majalah Hukum dan Pembangunan Tahun ke-27 No. 3, 1997.

KAMUS

Alan Giplin, *Dictionary of Terms*, ButterWorth&Co., London, 1977.

Henry Campell Black, *Black Law's Dictionary 6th Edition*, U.S West Publishing Company, USA, 1979, hlm 427.

SUMBER INTERNET

Achmad Syauqi, Cerita Petani Klaten Kena Tipu Jaringan Pupuk Palsu, https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4918593/cerita-petani-klaten-kena-tipu-jaringan-pupuk-palsu?_ga=2.256427147.1821548092.1645407765-1856995611.1645407765, 2020.

Aris Arianto, Polisi Grebek 7 Pabrik Produsen Pupuk di Wonogiri-Gunungkidul, https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4917731/polisi-gerebek-7-pabrik-produsen-pupuk-palsu-di-wonogiri-gunungkidul?_ga=2.72266715.951406186.1582521976-1350910593.1552469886, 2020.

Fahri Zulfikar, 10 Negara dengan Jumlah Penduduk Terbesar di Dunia, Indonesia Nomor Berapa?, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5703755/10-negara-dengan-jumlah-penduduk-terbesar-di-dunia-indonesia-nomor-berapa>, 2021.

Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Untuk Tumbuh Optimal Tanaman Perlu Hara Sulfur, <http://pustaka.setjen.pertanian.go.id/index-berita/untuk-tumbuh-optimal-tanaman-perlu-hara-sulfur>, 2015.

Mikael Nilman, Polda Metro Jaya Sita 110 Ton Pupuk Palsu di Bekasi, <https://www.beritasatu.com/megapolitan/461183/polda-metro-jaya-sita-110-ton-pupuk-palsu-di-bekasi>, 2017.

Petrokimia Gresik, STOK DAN DISTRIBUSI PUPUK NON SUBSIDI DIPERKUAT, <https://www.pupuk-indonesia.com/berita/stok-dan-distribusi-pupuk-non-subsidi-diperkuat>, 2021.

SUMBER BACAAN LAINNYA

Johannes Gunawan, et.al., Hukum Perikatan: Slides Mata Kuliah Hukum Perjanjian Universitas Katolik Parahyangan, Tidak Dipublikasikan, 2019.

Johannes Gunawan, et.al., Perjanjian Khusus: Slides Mata Kuliah Hukum Perjanjian Universitas Katolik Parahyangan, Tidak Dipublikasikan, 2019.